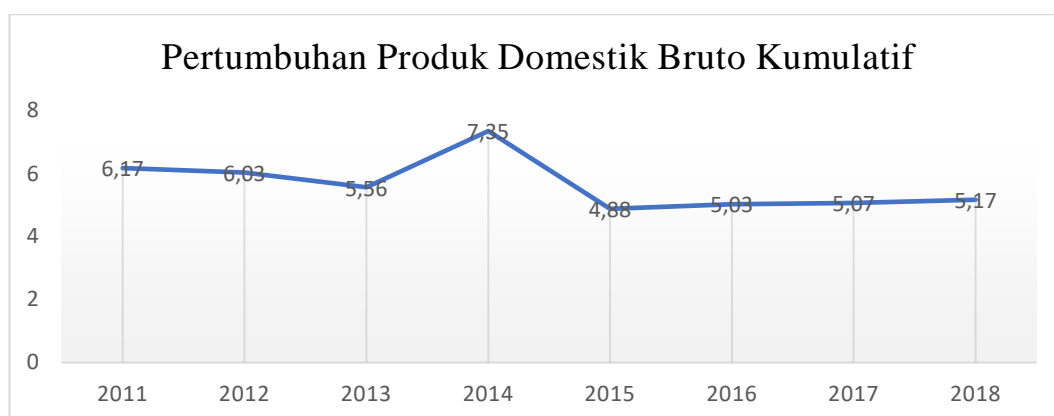


BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia setiap tahun mengalami hasil yang menggembirakan, tercermin dari Pendapatan Domestik Bruto yang dihasilkan. Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi negara dalam jangka waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan PDB nasional berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Untoro dalam Purnamasari, 2011). Peningkatan PDB secara nasional di sajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kumulatif
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional 2019

Fluktuasi dalam peningkatan PDB setiap tahun menunjukkan naik turunnya perkembangan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2014 terjadi peningkatan PDB paling tinggi mencapai 7,35 persen. Kenaikan PDB tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam keadaan yang terbaik. Namun empat tahun terakhir kenaikan PDB cenderung tidak signifikan.

PDB menggambarkan secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kesejahteraan masyarakat disusun oleh dua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan nonpertanian. Realita di negara Indonesia, peningkatan kesejahteraan petani dan penurunan kemiskinan tidak dapat dilihat dengan seberapa besar PDB perkapita yang dihasilkan. Peningkatan pendapatan perkapita baik

secara riil (harga konstan) maupun harga berlaku, tidak berhubungan positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin (Adi Setiyanto, 2015). Kejadian tersebut terjadi karena peningkatan pendapatan sektor non pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian.

Penuntasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan perkapita para petani. Sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi terhadap penuntasan kemiskinan, semakin tinggi perubahan terhadap PDB maka akan semakin tinggi kontribusi pertanian terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menjadikan pentingnya peningkatan PDB dari sektor pertanian sebagai tolak ukur dalam penuntasan kemiskinan.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah dengan tingkat PDRB perkapita terendah di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur. Dengan penghasilan perkapita 14,42 juta rupiah pertahun, dapat dilihat pada lampiran 1. Penyusun PDRB menurut lapangan Usaha terdiri dari sembilan lapangan usaha (sektor) yang salah satunya adalah pertanian (Badan Pusat Statistik Nasional, 2019). Peran pertanian sebagai salah satu penyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Tasikmalaya cukup besar yakni 38,35 persen dari total PDRB.

Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat terus dilakukan. Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya adalah disektor pertanian, namun setiap yang diupayakan oleh pemerintah masih belum dirasakan terhadap kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dari penerimaan PDRB perkapita yang masih rendah. Rendahnya penerimaan petani di daerah tersebut, karena dua pertiga penduduk di Kabupaten Tasikmalaya hidup di desa dan hidup dari bertani. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam upaya sebagai peningkatan kesejahteraan petani terutama bagi pelaku produsen komoditas pertanian. Dalam peningkatan kesejahteraan petani perlu adanya tolak ukur yang dapat dilihat perkembangannya.

Salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan alat Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menggambarkan keadaan riil daya tukar atau daya beli komoditas yang di usahakan, terhadap barang dan jasa

yang di konsumsi oleh rumah tangga petani dan barang dan jasa yang digunakan petani dalam proses produksi (Rachmat, 2000). Nilai tukar petani adalah rasio indeks yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konsep nilai tukar petani merupakan perbandingan antara kemampuan produk yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga petani dan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam proses produksi. Nilai tukar petani nasional setiap tahun mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesejahteraan petani di indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Tukar Petani Nasional

subsektor	Desember 2016			Desember 2017			YoY		
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tanaman pangan	126,58	128,92	98,18	136,47	132,64	102,89	7,81	2,88	47,9
Tanaman hortikultur	130,68	127,15	102,78	132,49	130,70	101,37	1,39	2,80	-1,37
Tanaman perkebunan Rakyat	125,45	126,35	992,9	130,54	130,04	100,38	4,06	2,92	1,11
Peternakan	129,40	120,73	1032,5	133,73	127,36	105,00	4,20	2,46	1,69
Perikanan Tangkap	135,01	123,21	1095,8	142,09	126,29	112,51	5,24	2,50	2,68
Perikanan Budidaya	123,58	125,13	98,76	127,73	128,18	99,65	3,36	2,44	0,91
Nasional	127,81	125,94	101,49	133,35	129,40	103,06	4,33	2,74	1,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional 2019

Keterangan :

It = indeks yang di terima petani

Ib = indeks yang di bayar petani

NTP = nilai Tukar petani

YoY = *year of Year*

Berdasarkan Tabel 1 NTP nasional pada tahun 2017 sebesar 103,06 dengan indeks yang diterima petani = 133,35 dan indeks yang dibayar petani = 129,40 (Badan Pusat Statistik Nasional, 2019). Artinya kesejahteraan petani secara nasional berada dalam kondisi sejahtera. Namun hal itu di dominasi oleh sektor perikanan

tangkap, sedangkan sektor lainnya indeks NTP nya masih kecil. peningkatan NTP dari tahun ke tahun sebesar 1,55. Dengan urutan NTP dari teratas berturut-turut yaitu : perikanan tangkap, peternakan, perikanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan budidaya perikan. Perkebunan berada di urutan ke dua NTP terkecil setelah perikanan budidaya. Hal ini perlu adanya perhatian pemerintah atau lembaga terkait, untuk meninjau kembali tentang kebijakan peningkatan kesejahteraan petani terutama pada sektor perkebunan. Nilai Tukar Petani Perkebunan di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Nilai Tukar Petani Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Kelompok/Subkelompok	Rata-rata Indeks				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Harga Diterima	161,98	169,55	174,24	111,98	115,27
Indeks Harga yang di Bayar	138,87	144,50	154,84	111,86	119,84
Nilai Tukar Petani	116,63	117,33	112,60	100,06	96,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2018

Dalam lima tahun terakhir NTP Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan hingga pada angka 96,19 persen. Rendahnya nilai tukar petani perkebunan menentukan kemampuan riil petani terhadap ketercukupannya kebutuhan atau kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani perkebunan dapat meningkat jika pendapatan naik dan pengangguran terselubung menurun. Pengangguran terselubung dapat di tekan dengan kegiatan menambah pendapatan petani selain dari usahatani. Usaha yang dilakukan petani untuk menambah pendapatannya dari sektor non pertanian yang disebut dengan Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga (NTPRP). Pendekatan lainnya yang di gunakan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan yaitu melalui pendekatan tujuh indikator yang ditetapkan badan pusat statistik.

Gunung Galunggung merupakan salah satu gunung api yang terletak di kawasan Jawa Barat dengan ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut, yang dijadikan sebagai objek wisata serta perkebunan kopi. Salah satu perkebunan kopi yang dikelola mempunyai karakteristik jenis usaha rumah tangga perkebunan rakyat (Swadaya). Lahan perkebunan kopi merupakan lahan garapan yang di miliki oleh lembaga kehutanan. Selain itu perkebunan yang bersifat swadaya atau mandiri

tanpa ada bimbingan maupun bantuan dari pihak atau lembaga dalam usahatani. Untuk itu, AM Fachir (2017) menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan kalangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil, sehingga sinergi tersebut memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan petani. Usaha rumah tangga petani Kopi harus dibina keberadaannya, baik dari segi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran dan kelembagaannya. Hal tersebut ditujukan agar petani menjadi subyek pembangunan dalam rencana mensejahterakan masyarakat.

Perkebunan yang bersifat swadaya atau usaha rumah tangga petani kopi memiliki beberapa permasalahan baik mengenai biaya, pendapatan, teknologi maupun pengolahan. Dalam masalah biaya para petani swadaya banyak yang menggunakan pupuk kimia sebagai sumber nutrisi dan pestisida sebagai pengendali hama, yang mengakibatkan pembekakan pada biaya yang dikeluarkan. Penggunaan bibit yang kurang bermutu, sumber daya manusia yang kurang terampil, dan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kopi yang dihasilkan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan petani, sehingga kemampuan riil petani terhadap daya beli untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk kebutuhan rumah tangga petani dan kebutuhan usahatani akan menurun.

Pada pengusahaan tanaman kopi, yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendapatan, karena sangat penting bagi kelangsungan hidup usahatani dan petani itu sendiri. Karakteristik tanaman kopi yang termasuk tanaman tahunan, hanya bisa di panen pada bulan tertentu dalam satu periode produksi. Banyak waktu luang yang memberikan kesempatan bagi petani untuk mencurahkan waktunya pada usaha lain untuk memperoleh pendapatan dan menjaga kesejahteraan keluarganya (Rahardian, 2002)

Menurut Saad (2006), adanya peluang untuk bekerja di luar kegiatan usahatani mendorong petani membuat keputusan untuk mengalokasikan tenaga kerja yang tersedia menjadi lebih efisien. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan tingkat pendapatan usahatani yang rendah, rumah tangga petani akan memaksimalkan pendapatannya dengan jalan mengkombinasikan kegiatannya. Hal tersebut menuntut petani kopi agar mampu memiliki strategi khusus untuk

dapat menjamin masuknya pendapatan dari sumber-sumber lainnya. Pendapatan dari sumber lain seperti usahatani non kopi atau profesi di luar usahatani, berdagang, peternakan, industri rumah tangga, perikanan, dan aktivitas lainnya. Strategi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai strategi nafkah ganda. Strategi nafkah ganda bertujuan agar petani mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa hanya bergantung pada pendapatan hasil usahatani kopi. Diterapkannya strategi nafkah ganda oleh petani kopi, menyebabkan terbaginya kontribusi pendapatan rumah tangga tani. Namun hal itu berdampak positif dalam meningkatkan total pendapatan rumah tangga petani kopi untuk mempertahankan kesejahteraannya. Meskipun kontribusi dari sektor non pertanian berdampak positif, akan tetapi kontribusi pendapatan usahatani kopi sebagai usaha yang di usahakan perlu diketahui besarnya. Besaran kontribusi dari masing-masing struktur pendapatan serta pengeluaran akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi. Maka untuk mengukur kesejahteraan tersebut peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) dan Pendekatan SUSENAS yang dilakukan Badan Pusat Statistik dengan tujuh indikator utama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petani Kopi di Lahan Kehutanan ?
2. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi di Lahan Kehutanan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan penelitian secara terperinci dapat diuraikan kedalam beberapa *point* penting yaitu untuk mengetahui :

1. Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petani Kopi di Lahan Kehutanan.
2. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perencana dan pengemban tugas sebagai pelaksana pembangunan pertanian menuju masyarakat sejahtera. Mengingat bahwa dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan.

1. Bagi Peneliti atau Mahasiswa

Penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pertanian yang berkenaan dengan kesejahteraan Rumah Tangga Petani

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan pertimbangan pemerintah, dalam membuat program kebijakan pembangunan pertanian yang tepat sasaran untuk kesejahteraan Petani Kopi. Terutama pelaku usahatani rumah tangga perkebunan rakyat (swadaya).

3. Bagi Petani

Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan usahatani komoditas kopi agar meningkatkan penerimaan. Sehingga bantuan-bantuan yang diturunkan dari pemerintah dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.

4. Bagi Pihak Swasta (*Investor*)

Sebagai tolak ukur dalam melakukan investasi untuk pengalokasian dana secara efisien guna mendorong petani terus berkembang dan memproduksi hasil yang di butuhkan pasar, serta sebagai *partner* dalam pengembangan bisnis terutama di bidang pengelolaan dan pengolahan kopi.